

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016 ini dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, penyusunan Laporan Kinerja ini juga menjadi alat kendali untuk

mendorong peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.

Selain itu LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan Stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, mejadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Isu Strategis Organisasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beberapa ISU STRATEGIS yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Pengelolaan Tata Pemerintahan Desa belum optimal;
2. Banyaknya desa yang belum melaksanakan pedoman teknis peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pembentukan peraturan desa;
3. Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar belum maksimal;
4. Masih banyak Desa yang belum memiliki Peta Desa/Batas Desa secara difinitif berdasarkan SK Bupati Banjar;
5. Masih kurang berperannya lembaga kemasyarakatan;
6. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan dan dalam penyusunan RPJMDes;
7. Masih kurang dilibatkannya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
8. Belum teridentifikasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kab / Kota;
9. Kurangnya Pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga;

10. Belum terinventarisirnya program-program pemerintah dibidang pengembangan usaha ekonomi mikro yang bersifat lintas sektoral yang masuk ke Pedesaan;
11. Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sejahtera**; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
2. **Barokah**; Barokah yang dimaksud adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 Misi Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komodias unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DPMD Kab. Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPMD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-4 (empat) dan misi ke-5 (lima) dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Misi ke-4 (empat) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah“ dan Misi ke-5 (lima) “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah”.

2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah:

1. Mewujudkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa
2. Mewujudkan desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Mewujudkan aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya
4. Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi dan kelembagan masyarakat
5. Mewujudkan Pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa
2. Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Terwujudnya Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya
4. Terwujudnya Pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat
5. Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan saran dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya
6. Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur
7. Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan professional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis

Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mendorong tertib administrasi dalam Pelaksanaan pemerintahan desa
2. Mendorong tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Terpantaunya perkembangan desa
3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
4. Mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan

5. Mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa
6. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana desa
8. Mendorong perkembangan Teknologi Tepat Guna di desa

Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap tertib administrasi pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan
2. Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan desa
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
5. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
6. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
7. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
8. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indicator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja pada tabel tersebut merupakan perjanjian kinerja tahun 2016 sebagaimana pada lampiran.

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja murni sebesar Rp 9.807.440.953,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp 11.107.416.498,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 3.081.424.298,- dan Belanja Langsung Rp 8.025.992.200,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 10.152.417.693,- (91,40 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 2.814.944,- (27,77 %) belanja langsung sebesar Rp 7.337.468.483 ,- (72,27 %). Dalam mekanisme APBD perubahan 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar mendapatkan tambahan pagu dana dikarenakan adanya kegiatan yang sangat urgen yaitu pemilihan pembakal serentak di 117 desa di Kabupaten Banjar. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang harus dihapus / tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan dana DAU.

2.5. Alokasi Anggaran persasaran strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 anggaran belanja langsung per sasaran strategis :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	3.779.241.800,-	1 program, 1 kegiatan
2.	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	0	-
3.	Terwujudnya Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	540.970.000,-	1 program, 1 kegiatan
4.	Terwujudnya Pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	1.676.400.500	4 program, 7 kegiatan
5.	Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan saran dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	1.880.700.900,-	2 program, 13 kegiatan
6.	Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	140.706.000	2 program, 2 kegiatan
7.	Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan professional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	8.000.000,-	1 program, 3 kegiatan

Maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KON DISI AWAL	TAHUN I		TAHUN II		TAHUN III		TAHUN IV		TAHUN V		KON DISI AKHIR
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	%	13,35	27,80	2.440.616.800	42,24	702.496.200	56,68	1.175.000.000	71,12	4.575.000.000	85,56	1.250.000.000	85,56
2	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	%	0	19,85	0	39,70	300.000.000	59,55	600.000.000	79,40	700.000.000	99,25	775.000.000	99,25
3	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	%	13,35	27,80	960.970.000	42,24	975.000.000	56,68	975.000.000	71,12	1.100.000.000	85,56	1.300.000.000	85,56
4	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	%	0	29,96	1.003.410.000	37,18	1.657.917.500	44,40	1.824.000.000	51,62	1.995.000.000	58,84	2.192.000.000	58,84

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KON DISI AWA	TAHUN I		TAHUN II		TAHUN III		TAHUN IV		TAHUN V		KON DISI AKHI
		Jumlah kelompok UEM yang terlatih	kelompok	0	0	356.940.000	36	307.870.000	36	456.940.000	36	506.940.000	50	556.940.000	50
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk	buah	6	6	75.510.000	10	75.510.000	20	205.804.000	30	411.608.000	40	450.000.000	40
		Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti	kali	3	3	176.685.000	3	166.620.000	3	402.595.000	3	422.595.000	3	422.595.000	16
5	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	keg	3	3	255.049.200	4	300.000.000	4	174000000	4	186.000.000	4	198.000.000	4
		Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	keg	6	6	769.338.950	6	764.530.040	6	992.260.000	6	1.029.260.000	6	1.127.970.000	6

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KON DISI AWA	TAHUN I		TAHUN II		TAHUN III		TAHUN IV		TAHUN V		KON DISI AKHI
		Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	tahun	1	1	610.318.200	1	625.000.000	1	650.000.000	1	675.000.000	1	700.000.000	1
		Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	tahun	1	1	278.513.610	1	306213610	1	330.000.000	1	355.000.000	1	380.000.000	1
6	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	%	100	100	0	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100
		Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	%	100	100	0	100	00	100	0	100	0	100	0	100
		Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman	%	100	100	0	100	00	100	0	100	0	100	0	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KON DISI AWA	TAHUN I		TAHUN II		TAHUN III		TAHUN IV		TAHUN V		KON DISI AKHI
		pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS													
		Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	orang	13	10	105.000.000	10	125.000.000	10	135.000.000	10	145.000.000	10	155.000.000	10
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	dok	4	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4	1.500.000.000	4
		Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	dok	3	3	6.500.000	3	6.500.000	3	6.500.000	3	6.500.000	3	6.500.000	3

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dievaluasi kembali untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun X			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun x terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	13,35	27,80	27,80	100	85,56	32,49
2	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	0	19,85	19,85	100	99,25	20
3	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	13,35	27,80	27,80	100	85,56	32,49
4	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	22,74	29,96	22,74	75,90	58,84	38,64
		Jumlah kelompok UEM yang terlatih	0	0	0	0	50	0
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk	6	6	6	100	40	15
		Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti	3	3	1	33,33	16	6,25
5	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3	3	3	100	15	20
		Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6	6	6	100	30	20
		Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1	1	1	100	5	20
		Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	1	1	1	100	5	20

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun X			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun x terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8
6	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100	100	100	100	100	20
		Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100	100	100	100	100	20
		Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100	100	100	100	100	20
		Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	13	10	12	120	50	24
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sitematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	4	4	4	100	20	20
		Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3	3	3	100	15	20

Keterangan : indikator kinerja berwarna merah adalah indikator kinerja dalam RPJMD

Dari tabel di atas terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Pada tahun 2016, 14 (empat belas) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar > 100%. Sementara itu, sebanyak 3 (tiga) indikator atau sebesar < 100% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan dengan persentase 120 %, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase desa berkembang dengan presentase 75,90 % dan indikator Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti dengan persentase 33,33 % dan indikator Jumlah kelompok UEM yang terlatih dengan persentase 0 %.

3. 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa.

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa dengan indikator Persentase kelengkapan administrasi desa dihitung berdasarkan jumlah desa yang tertib administrasi dibagi dengan jumlah seluruh desa dikalikan 100%, untuk tahun 2016 indikator persentase kelengkapan administrasi desa tercapai 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan desa yang tertib administrasi sebanyak 40 desa (14,45 %) sehingga tercapai target yang telah ditentukan. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 baru mencapai 32,49%. Target ini bisa tercapai karena adanya kegiatan pembinaan kelengkapan administrasi desa yang dilaksanakan ke desa – desa. Dari Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan / desa telah tercapai 100 persen dengan pagu dana Rp.3.779.241.800 Terealisasi Rp. 3.386.605.099 (89,61 %).

3.2.2. Sasaran Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa.

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa dengan indikator Persentase desa tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dihitung berdasarkan Jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dibagi dengan jumlah seluruh desa dikalikan 100%, untuk tahun 2016 indikator persentase kelengkapan administrasi desa tercapai 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa sebanyak 40 desa (19,85 %) sehingga tercapai target yang telah ditentukan. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 baru mencapai 20%. Target ini bisa tercapai karena adanya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

3.2.3. Sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan indikator Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dihitung berdasarkan jumlah desa yang aparatur desanya mampu menjalankan tugas dan fungsinya dibagi jumlah seluruh desa dikalikan 100%, untuk tahun 2016 indikator persentase kelengkapan administrasi desa tercapai 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan desa yang tertib administrasi sebanyak 40 desa (14,45 %) sehingga tercapai target yang telah ditentukan. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 baru mencapai 32,49%. Target ini bisa tercapai karena adanya kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. Dari Kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa telah tercapai 100 % dengan pagu dana Rp.540.970.000 Terealisasi Rp. 540.330.000. (99,88 %)

3.2.4. Sasaran Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat.

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan indikator Persentase desa berkembang dihitung berdasarkan

Persentase desa berkembang dikalikan 100%, untuk tahun 2016 indikator persentase kelengkapan administrasi hanya tercapai (75,90 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2015 tidak terjadi peningkatan, realisasi tetap sama dengan tahun 2015 (22,74 %) Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 baru mencapai 38,64%. Target ini tidak tercapai Karena tidak adanya anggaran yang mendukung pencapaian target pada Tahun 2016. Kegiatan yang mendukung target tersebut telah dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2016 namun karena adanya pengurangan dana DAU sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk tahun 2017 telah dianggarkan dana untuk pencapaian target tahun 2017.

Dari sasaran tersebut diatas didukung oleh indikator kinerja pendukung / indikator Renstra yaitu :

1. Jumlah kelompok UEM yang terlatih.

Indikator Jumlah kelompok UEM yang terlatih dihitung berdasarkan jumlah kelompok UEM yang dilatih untuk peningkatan wawasan dalam hal kegiatan pengembangan UEM, untuk tahun 2016 indikator Jumlah kelompok UEM yang terlatih target 0 kelompok, Kegiatan yang mendukung target tersebut telah dianggarkan pada APBD perubahan Tahun 2016 namun karena adanya pengurangan dana DAU sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk tahun 2017 telah dianggarkan dana untuk pencapaian target tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2020 baru mencapai 0 %.

2. Jumlah BUMDesa yang terbentuk

Indikator Jumlah BUMDesa yang terbentuk dihitung berdasarkan Jumlah BUMDesa yang terbentuk atas inisiatif desa. Untuk tahun 2016 indikator Jumlah BUMDesa yang terbentuk dengan target 6 BUMDesa dapat terealisasi 6 BUMDesa sehingga realisasi bisa tercapai 100 %. Target ini bisa tercapai karena adanya kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDesa (sosialisasi BUMDesa) . Dari Kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen BUMDesa telah tercapai 100 % dengan pagu dana Rp.67.553.700 terealisasi Rp. 65.788.700 (97,38 %). Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 baru mencapai 15 %.

3. Jumlah kegiatan gelar TTG / pameran potensi desa yang diikuti Indikator Jumlah kegiatan gelar TTG / pameran potensi desa yang diikuti dihitung berdasarkan jumlah kegiatan gelar teknologi tepat guna / pameran potensi desa yang diikuti dalam satu tahun. Untuk tahun 2016 indikator Jumlah kegiatan gelar TTG / pameran potensi desa yang diikuti dengan target 3 kali hanya bisa diikuti 1 kali, sehingga realiasinya hanya 33,33 %. Target ini tidak tercapai karena kurangnya anggaran Kegiatan yang mendukung target tersebut sdh dianggarkan pada APBD perubahan namun karena adanya pengurangan dana DAU sehingga penambahan kegiatan ini harus dihapus. Target ini didukung oleh kegiatan fasilitasi keitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan telah tercapai 100 % dengan pagu dana Rp.197.849.800 Terealisasi Rp. 171.336.488 (86,60 %). Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2020 baru mencapai 6,25 %.

Terdapat 3 sasaran penunjang untuk kegiatan Rutin perkantoran antara lain :

- 3.2.5 Sasaran Terwujudnya kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya.

Dengan indikator sasaran : Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa, Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor, Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas, Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran semuanya dapat tercapai 100 %. Pencapaian target kinerja ini didukung oleh kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran, pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor). Kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut dapat terealisasi 100 %. Jika dibandingkan tahun lalu capaian kinerja tetap dan tercapai 100 %. Namun jika dibandingkan dengan target renstra baru tercapai 20 %.

3.2.6 Sasaran Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur.

Dengan indikator sasaran Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan, Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan, Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS, Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan, semuanya dapat tercapai 100 %. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah : pengadaan mesin kartu absensi, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan. kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut dapat terealisasi 100 %. Jika dibandingkan tahun lalu capaian kinerja tetap dan tercapai 100 %. Namun jika dibandingkan dengan target renstra baru tercapai 20 %.

3.2.7 Sasaran Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis.

Dengan indikator sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu, Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu semuanya dapat tercapai 100 %. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut dapat terealisasi 100 %. Jika dibandingkan tahun lalu capaian kinerja tetap dan tercapai 100 %. Namun jika dibandingkan dengan target renstra baru tercapai 20 %.

3.3 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

(Hanya untuk capaian kinerja \geq 100%)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang \geq 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	120	83,74	16,26

Sasaran Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur, dengan indikator kinerja Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan dapat terealisasi 120 %. Hal ini didukung oleh kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan – perundang – undangan dengan pagu dana Rp. 125.000.000 terealisasi Rp. 104.680.000. (83,74 5). Tingkat efisiensi sebesar 16,26 %. % capaian kinerja melampaui target dikarenakan biaya bintek yg direncanakan untuk 10 orang dalam 1 tahun ternyata bisa dilaksanakan untuk 12 orang.

3.4 . Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 7.337.468.483 (91,42 %) dari total anggaran yang dialokasikan Rp. 8.025.992.200. Realisasi anggaran untuk program / kegiatan utama sebesar 76,62 %, sedangkan realisasi untuk program / kegiatan pendukung sebesar 23,38 %. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Namun harus dianggarkan dana di Tahun 2017 untuk mencapai target di tahun 2017 untuk 3 (tiga) indikator di tahun 2016 yang capaiannya di bawah 100 %.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	27,80	27,80	100	Program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	3.779.241.800	3.386.605.099	89,61
2	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	19,85	19,85	100	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	0	0	0
3	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	27,80	27,80	100	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	540.970.000	540.330.000	99,88
4	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	29,96	22,74	75,90	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	482.050.000	470.940.724	97,70
						Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	474.940.000	447.254.780	94,17
						Program peningkatan peran serta	223.240.000	184.739.120	82,75

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kelompok UEM yang terlatih	0	0	0	dan kesetaraan jender dalam pembangunan			
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk	6	6	100	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	230.740.000	194.310.336	84,21
						Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	0	0	0
						Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	67.553.700	65.788.700	97,39
		Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti	3	1	33,33	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	197.849.800	171.336.488	86,60
5	Terwujudnya kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3	3	100	Program pelayanan administrasi perkantoran	239.343.750	212.309.792	88,70
				6	100	Program pelayanan administrasi	754.984.260	691.839.520	91,64

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6	1	100	perkantoran			
		Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1	1	100	Program pelayanan administrasi perkantoran	610.318.200	575.033.792	94,22
		Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	1			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	276.054.690	269.800.132	97,73
6	Terwujudnya peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya	100	100	100				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terhadap total karyawan		100	100	Program peningkatan disiplin aparatur	15.706.000	15.000.000	95,50
		Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100	100	100				
		Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100	12	120				
		Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total	10			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	125.000.000	104.680.000	83,74

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		karyawan							
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	4	4	100	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	1.500.000	1.500.000	100
		Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3	3	100	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	6.500.000	6.000.000	92,31

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 7 (tujuh) sasaran strategis yang diukur dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Pada tahun 2016, 14 (empat belas) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar > 100%. Sementara itu, sebanyak 3 (tiga) indikator atau sebesar < 100% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan dengan persentase 120 %, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase desa berkembang dengan presentase 75,90 % dan indikator Jumlah kegiatan gelar TTG/Pameran potensi desa yang diikuti dengan persentase 33,33 % dan indikator Jumlah kelompok UEM yang terlatih dengan persentase 0 %.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang

baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.